

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KEPATUHAN PENGELOLAAN AKTIVA TETAP PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB RENGAT

ANALYSIS OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM ON COMPLIANCE IN FIXED ASSET MANAGEMENT AT THE CLASS IIB RENGAT STATE DETENTION CENTER

Fery Kustian¹, Ira Gustina², Novriani Susanti³.

- ¹) Univesitas Islam Indragiri, Tembilahan Provinsi Riau, Email: ferykustian@gmail.com
²) Univesitas Islam Indragiri, Tembilahan Provinsi Riau, Email: iragustina85@gmail.com
³) Univesitas Islam Indragiri, Tembilahan Provinsi Riau, Email: novrianisusanti95@gmail.com

ABSTRAK: Penelitian ini dimotivasi oleh pentingnya sistem pengendalian internal untuk memastikan kepatuhan terhadap pengelolaan aset tetap di lembaga pemerintah. Pengelolaan aset yang buruk dapat menyebabkan masalah administratif, perbedaan inventaris, dan berdampak pada akuntabilitas atas properti negara. Penelitian ini mempunyai tujuan guna menganalisis peran sistem pengendalian internal pada kepatuhan di Lembaga Pemasyarakatan Negara Kelas IIB Rengat. Dengan menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif, data didapatkan lewat dokumentasi, observasi, serta wawancara yang melibatkan mereka yang mengelola aset tetap. Analisis data melibatkan reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan guna memberikan gambaran yang jelas tentang implementasi pengendalian internal. Temuan menunjukkan bahwa meskipun pengendalian internal telah diterapkan, tantangan tetap ada, seperti pengawasan yang tidak memadai, pencatatan yang tidak teratur, dan keterbatasan sumber daya manusia. Masalah-masalah ini berdampak pada tingkat kepatuhan. Studi ini menyimpulkan bahwa peningkatan efektivitas pengendalian internal, penguatan pengawasan, dan peningkatan kompetensi staf sangat penting untuk mendukung kepatuhan dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Inventarisasi, Administrasi Aset, Pengawasan Internal, Kepatuhan Aparatur.

ABSTRACT: This study is motivated by the importance of internal control systems in ensuring compliance with fixed asset management in government institutions. Poor asset management can lead to administrative problems, inventory discrepancies, and impact accountability for state property. The purpose of the study is to examine how the Class IIB Rengat State Detention Center's internal control system contributes to compliance. Data were gathered through observations, interviews, and documentation with people in charge of fixed assets using a qualitative descriptive technique. Data analysis involved reducing, presenting, and drawing conclusions to provide a clear picture of internal control implementation. The findings show that while internal controls are in place, challenges remain, such as insufficient supervision, irregular record-keeping, and limited human resources. These issues impact compliance levels. The study concludes that improving internal control effectiveness, strengthening supervision, and enhancing staff competence are essential to support compliance and accountability in asset management.

Keywords: Accountability, Inventory Management, Asset Administration, Internal Supervision, Administrative Compliance.

A. PENDAHULUAN

Pengelolaan aktiva tetap pada instansi pemerintah merupakan bagian integral dari sistem pengelolaan keuangan negara yang mempunyai tujuan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Aktiva tetap sebagai bagian dari barang milik negara memiliki nilai strategis karena digunakan secara langsung dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

organisasi. Pengelolaan yang tidak tertib, baik dalam aspek pencatatan, pengamanan, pemeliharaan, maupun pelaporan, berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara kondisi fisik dan data administrasi serta dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan. Permasalahan tersebut sering kali menjadi temuan dalam pemeriksaan internal maupun eksternal, yang menunjukkan bahwa aspek pengendalian masih perlu diperkuat.

Sistem pengendalian internal berperan sebagai instrumen utama untuk mengurangi potensi kecurangan maupun kekeliruan dalam pengelolaan aktiva tetap. Secara teoretis, sistem ini berupa seperangkat aturan dan langkah kerja yang disusun guna memberikan jaminan yang memadai terhadap tercapainya kegiatan operasional yang efektif dan efisien, tersajinya laporan yang andal, terjaganya keamanan aset, serta terpenuhinya ketentuan hukum yang berlaku. Komponen pengendalian internal yang mencakup lingkungan pengendalian, analisis risiko, pelaksanaan aktivitas pengendalian, pengelolaan informasi dan komunikasi, serta kegiatan pemantauan perlu dilaksanakan secara selaras agar menghasilkan tata kelola yang sistematis dan akuntabel. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan aktiva tetap tidak semata-mata bergantung pada adanya prosedur tertulis, melainkan juga pada penerapan yang konsisten dalam praktiknya.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat sebagai unit pelaksana teknis memiliki tanggung jawab dalam mengelola berbagai aktiva tetap yang digunakan untuk menunjang operasional pelayanan dan pengamanan. Karakteristik operasional lembaga pemasyarakatan yang menuntut aspek keamanan tinggi dan aktivitas administratif yang berkelanjutan menjadikan pengelolaan aktiva tetap sebagai aspek yang krusial. Berdasarkan kondisi empiris yang ditemukan, masih terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan aktiva tetap, seperti ketidakteraturan dalam pembaruan data inventaris, kurang optimalnya pengawasan internal, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memahami administrasi aset secara komprehensif. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwasanya sistem pengendalian internal yang dipergunakan tidak sepenuhnya efektif dalam mendorong kepatuhan pengelolaan aktiva tetap.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya evaluasi secara sistematis terhadap efektivitas sistem pengendalian internal dalam meningkatkan kepatuhan pengelolaan aktiva tetap. Kepatuhan dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai ketaatan terhadap aturan tertulis, tetapi juga sebagai konsistensi dalam menjalankan prosedur administrasi, menjaga akurasi pencatatan, serta memastikan keberadaan dan kondisi aset sesuai dengan data yang dilaporkan. Evaluasi terhadap sistem pengendalian internal menjadi penting untuk mengidentifikasi kelemahan yang ada serta merumuskan langkah perbaikan yang relevan.

Penelitian ini mempunyai tujuan guna menganalisis sistem pengendalian internal kepada kepatuhan pengelolaan aktiva tetap pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian akuntansi sektor publik terkait peran pengendalian internal dalam membentuk perilaku kepatuhan aparatur. Secara praktisnya, berharap temuan ini bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk pihak manajemen guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan memperbaiki prosedur administrasi aset. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang diarahkan pada unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan instansi pemerintah daerah atau kementerian pada umumnya. Oleh karenanya, berharap temuan ini mampu memberi kontribusi pada penguatan tata kelola pengelolaan aktiva tetap melalui sistem pengendalian internal yang lebih efektif, sehingga dapat mendukung terciptanya akuntabilitas serta transparansi pada pengelolaan barang milik negara.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif digunakan dalam memperoleh wawasan yang luas terkait penerapan sistem pengendalian internal serta hubungannya dengan kepatuhan pengelolaan aktiva tetap. Penelitian deskriptif analitis mempunyai tujuan guna menggambarkan kondisi yang ada di lapangan dan menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pengendalian internal yang berlaku.

Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa instansi tersebut mengelola aktiva tetap sebagai bagian dari barang milik negara yang memerlukan sistem pengendalian internal yang memadai. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2025 mulai dari tahap pengumpulan data hingga analisis.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang berasal dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Peneliti memperoleh data primer melalui kegiatan wawancara secara langsung dengan para informan yang terlibat dalam penelitian. Sementara itu, peneliti mengumpulkan data sekunder dari berbagai dokumen pendukung, antara lain daftar inventaris barang, Kartu Inventaris Barang (KIB), laporan aset tetap, laporan keuangan, serta regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik negara.

Populasi dan Sampel/Responden/ Informan Penelitian

Populasi pada penelitian ini mencakup semua pegawai yang terlibat pada pengelolaan aktiva tetap di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling*, yaitu pemilihan responden berdasarkan keterlibatan langsung dalam proses pencatatan, pengamanan, dan pelaporan aktiva tetap. Informan menyatakan penelitian meliputi kepala subbagian tata usaha, pengelola barang, bendahara, dan staf administrasi.

Variabel/Fokus Data

Fokus penelitian ini adalah penerapan beberapa unsur sistem pengendalian internal yang mencakup penilaian risiko, lingkungan pengendalian, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, pemantauan, maupun tingkat kepatuhan pengelolaan aktiva tetap yang mencakup aspek pencatatan, penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, inventarisasi, dan pelaporan. Penelitian ini tidak menggunakan hipotesis karena bersifat kualitatif dan bertujuan untuk menganalisis fenomena secara mendalam.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara semi-terstruktur, pengamatan langsung terhadap kegiatan pengelolaan aset tetap, serta penelaahan dokumen terkait. Analisis data menerapkan model analisis interaktif yang mencakup tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan menguji kesesuaian informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumen yang relevan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini mempergunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, mencakup 3 tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta verifikasi/penarikan kesimpulan (*verification/conclusion drawing*). Model ini dipilih karena mampu memberikan kerangka sistematis dalam mengolah data kualitatif secara mendalam dan berkesinambungan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Rengat adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Rutan ini bertanggung jawab melaksanakan pelayanan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa selama tahapan penyidikan, penuntutan, hingga proses persidangan. Selain itu, Rutan juga menjalankan fungsi pengamanan serta pengelolaan administrasi pemasyarakatan dengan berpedoman

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan Rutan Kelas IIB Rengat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu dan sekitarnya. Seiring dengan meningkatnya jumlah warga binaan serta kompleksitas pelayanan publik, Rutan Kelas IIB Rengat dituntut untuk terus melakukan penyesuaian dan peningkatan kapasitas, baik dari aspek

kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, maupun penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas tersebut, Rutan Kelas IIB Rengat didukung oleh berbagai aktiva tetap yang meliputi bangunan gedung perkantoran dan blok hunian, kendaraan operasional, peralatan keamanan, peralatan kantor, serta sarana penunjang lainnya. Aktiva tetap tersebut memiliki peran strategis dalam memastikan kelancaran kegiatan pelayanan, pembinaan, dan pengamanan warga binaan. Oleh karena itu, pengelolaan aktiva tetap yang tertib, administrasi, transparan, dan akuntabel menjadi aspek yang sangat penting dalam mendukung efektivitas organisasi.

Pengelolaan aktiva tetap di Rutan Kelas IIB Rengat dilaksanakan berdasarkan regulasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) serta mengacu pada prinsip-prinsip SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah). Penerapan sistem pengendalian internal dimaksudkan guna memberi keyakinan memadai bahwa pengelolaan aset telah dijalankan secara efisien dan efektif, pelaporan keuangan diperlihatkan secara andal, aset negara terlindungi dari risiko kehilangan atau penyalahgunaan, serta seluruh kegiatan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan karakteristik tersebut, Rutan Kelas IIB Rengat menjadi objek penelitian yang relevan dalam mengkaji hubungan antara penerapan sistem pengendalian internal dan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan aktiva tetap. Analisis terhadap kondisi aktual diharapkan dapat mengidentifikasi potensi kelemahan pengendalian, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola aset negara secara berkelanjutan.

Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan checklist evaluasi SPIP berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 yang terdiri atas lima unsur. Hasil analisis di Rutan Kelas IIB Rengat menunjukkan bahwa penerapan SPIP telah dilakukan, namun belum sepenuhnya optimal.

Tabel 1: Bagian Laporan BPK yang Berkaitan dengan SPI dan Pengelolaan Aset Tetap

No	Bagian dalam LHP BPK LKPP 2023	Isi Pokok	Keterkaitan dengan Aset Tetap
1	Bab I – Kelemahan SPI	Rekap kelemahan sistem pengendalian intern	Akar masalah lemahnya pencatatan dan pengamanan aset
2	Bab I Bagian E – Aset	Pengelolaan persediaan dan aset tetap	Membahas langsung permasalahan aset
3	Tabel 72	Permasalahan aset tetap pada K/L dan BUN	Menyajikan nilai dan jumlah entitas bermasalah
4	Uraian KDP	Penelusuran data KDP melalui SAKTI	Menunjukkan lemahnya monitoring
5	Kesimpulan Pemeriksaan	Dampak kelemahan SPI terhadap LKPP	Risiko salah saji aset tetap

Sumber: LHP BPK RI atas SPI dan Kepatuhan LKPP Tahun 2023.

Merujuk dari Tabel 1 menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan aset tetap dalam

LKPP tahun 2023 berkaitan erat dengan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Pada Bab I bagian Kelemahan SPI, BPK menegaskan bahwa lemahnya pengendalian menjadi akar masalah dalam pencatatan dan pengamanan aset negara. Bab I Bagian E – Aset secara khusus menguraikan berbagai temuan terkait pengelolaan persediaan dan aset tetap pada K/L serta BUN. Tabel 72 memperlihatkan jumlah entitas bermasalah beserta nilai temuan yang signifikan, sehingga menggambarkan dampak kuantitatif kelemahan tersebut. Uraian mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) melalui Sistem SAKTI menunjukkan masih lemahnya

fungsi monitoring dan pengawasan. Pada akhirnya, kesimpulan pemeriksaan BPK menegaskan bahwa kelemahan SPI tersebut meningkatkan risiko salah saji aset tetap dalam LKPP. Temuan BPK menunjukkan bahwa kelemahan SPI berdampak langsung terhadap pengelolaan aset tetap secara nasional. Hal ini menjadi konteks pembandingan dalam menganalisis kondisi di Rutan Kelas IIB Rengat.

Tabel 2: Keterkaitan Temuan Pengelolaan Aset Tetap dengan Unsur SPIP

No	Temuan BPK	Unsur SPIP Lemah	Penjelasan
1	Aset tidak diketahui keberadaannya	Lingkungan & Kegiatan Pengendalian	Pengamanan fisik dan administrasi tidak efektif
2	Tidak didukung dokumen kepemilikan	Kegiatan Pengendalian	Prosedur administrasi tidak dijalankan
3	Aset dikuasai pihak lain	Kegiatan & Pemantauan	Pengawasan penggunaan lemah
4	KDP tidak mutasi lama	Penilaian Risiko & Pemantauan	Risiko tidak diidentifikasi
5	Aset rusak belum direklasifikasi	Informasi & Komunikasi	Data tidak diperbarui
6	Pencatatan tidak tertib	Informasi & Komunikasi	Sistem tidak akurat
7	Nilai aset tidak wajar	Seluruh unsur SPIP	Pengendalian tidak berjalan menyeluruh

Sumber: LHP BPK RI Tahun 2023.

Tabel 2 menunjukkan bahwa temuan BPK terkait pengelolaan aset tetap mencerminkan kelemahan pada berbagai unsur SPIP. Aset yang tidak diketahui keberadaannya serta tidak didukung dokumen kepemilikan menunjukkan lemahnya lingkungan dan kegiatan pengendalian, khususnya dalam pengamanan fisik dan administrasi. Aset yang dikuasai pihak lain serta KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan) yang tidak merasakan mutasi dengan jangka waktu lama mengindikasikan kelemahan pada aspek penilaian risiko dan pemantauan. Selain itu, aset rusak yang belum direklasifikasi dan pencatatan yang tidak tertib mencerminkan lemahnya sistem informasi dan komunikasi karena data tidak diperbarui secara akurat. Nilai aset yang tidak dapat diyakini kewajarannya menunjukkan bahwa pengendalian tidak berjalan secara menyeluruh pada seluruh unsur SPIP. Dengan demikian, tabel tersebut menegaskan bahwa permasalahan aset tetap bukan hanya persoalan administratif, tetapi berkaitan langsung dengan efektivitas penerapan SPIP secara komprehensif.

Tabel 3: Permasalahan Pengelolaan Aset Tetap pada K/L dan BUN Tahun 2023

No	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai Temuan (Rp)
1	Aset tidak diketahui lokasi	32	242.543.395.737
2	Tidak didukung dokumen kepemilikan	19	6.214.455.775.104
3	Dikuasai pihak lain	30	2.489.211.153.176
4	KDP tidak mutasi lama	46	18.307.623.686.559
5	Aset rusak belum direklasifikasi	19	20.804.929.921
6	Pencatatan tidak tertib	42	718.970.395.001
7	Permasalahan lainnya	38	10.149.391.334.258
	Jumlah		38.143.000.669.757

Sumber: BPK RI, LHP SPI dan Kepatuhan atas LKPP 2023.

Tabel 3 menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan aset tetap pada Kementerian/Lembaga (K/L) serta BUN tahun 2023 masih signifikan baik dari sisi jumlah entitas maupun nilai temuan. Permasalahan terbesar terdapat pada Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang tidak mengalami mutasi dalam jangka waktu lama, yaitu pada 46 K/L dengan nilai mencapai Rp18,3 triliun, yang menunjukkan lemahnya pengendalian dan monitoring atas aset dalam proses. Selain itu, permasalahan lainnya yang bernilai Rp10,14 triliun serta aset yang tidak didukung dokumen kepemilikan sebesar Rp6,21 triliun juga mencerminkan rendahnya tertib administrasi dan kepastian hukum atas aset negara. Aset yang dikuasai pihak lain dan pencatatan yang tidak tertib semakin memperkuat indikasi lemahnya sistem pengendalian intern dalam pengamanan dan pelaporan aset. Meskipun nilai aset rusak yang belum direklasifikasi relatif lebih kecil, kondisi tersebut tetap menunjukkan ketidaksesuaian antara kondisi fisik dan pencatatan akuntansi. Secara keseluruhan, total nilai temuan sebesar Rp38,14 triliun menegaskan bahwa pengelolaan aset tetap masih memerlukan penguatan sistem pengendalian intern agar lebih transparan, tertib, dan akuntabel.

Pembahasan

Efektivitas SPIP terhadap Kepatuhan

Hasil penelitian di Rutan Kelas IIB Rengat menunjukkan bahwa secara formal prosedur pengelolaan aktiva tetap telah tersedia. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan keterbatasan dalam konsistensi pencatatan, kelengkapan dokumen pendukung, serta pelaksanaan inventarisasi berkala. Kelemahan pada unsur penilaian risiko dan pemantauan menyebabkan potensi ketidaksesuaian data inventaris. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas SPIP belum sepenuhnya optimal dalam mendorong kepatuhan pengelolaan aktiva tetap.

Faktor Perilaku dan SDM

Faktor perilaku aparatur seperti komitmen, disiplin, dan kesadaran pengendalian menjadi penentu utama kepatuhan. Aparatur dengan pemahaman tinggi terhadap akuntabilitas cenderung lebih konsisten dalam menjalankan prosedur administrasi. Pendekatan akuntansi perilaku menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal bukan hanya bergantung kepada regulasi, melainkan pada integritas serta motivasi individu.

Hubungan Sistem Pengendalian Internal dengan Kepatuhan

Analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara kualitas penerapan SPIP dan tingkat kepatuhan pengelolaan aktiva tetap.

1. Lingkungan pengendalian yang kuat meningkatkan disiplin.
2. Kegiatan pengendalian mencegah kesalahan pencatatan.

3. Informasi yang akurat mendukung keandalan laporan.
4. Pemantauan yang efektif mencegah penyimpangan.

Sebaliknya, kelemahan pada unsur SPIP berpotensi menimbulkan risiko salah saji sebagaimana ditemukan dalam LHP BPK RI Tahun 2023.

Implikasi

Penguatan SPIP di Rutan Kelas IIB Rengat perlu difokuskan pada:

1. Peningkatan kompetensi SDM pengelola aset.
2. Evaluasi risiko secara berkala.
3. Optimalisasi sistem informasi aset.
4. Penguatan fungsi pemantauan dan tindak lanjut.

Secara teoritis, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal merupakan determinan utama kepatuhan pengelolaan aktiva tetap di sektor publik.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis sistem pengendalian internal terhadap kepatuhan pengelolaan aktiva tetap pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal telah dilaksanakan sesuai dengan kerangka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), namun belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Secara formal, unsur-unsur pengendalian seperti lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi, maupun pemantauan telah tersedia dalam bentuk struktur organisasi, pembagian tugas, dan prosedur administrasi pengelolaan aset.

Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat beberapa kelemahan, terutama pada aspek penilaian risiko dan konsistensi pemantauan. Hal tersebut berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam pengelolaan aktiva tetap, khususnya dalam hal ketertiban pencatatan, kelengkapan dokumen pendukung, serta pembaruan data inventaris. Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal mempunyai keterkaitan kepada tingkat kepatuhan pengelolaan aktiva tetap. Semakin baik penerapan unsur-unsur pengendalian internal, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam pengelolaan aset. Oleh karenanya, sistem pengendalian internal mempunyai peranan penting untuk mendukung akuntabilitas dan tata kelola aktiva tetap di lingkungan Rutan Kelas IIB Rengat.

Saran

Merujuk dari kesimpulan, beberapa saran yang bisa diberikan adalah:

1. Rutan Kelas IIB Rengat perlu meningkatkan evaluasi dan dokumentasi penilaian risiko secara berkala untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dalam pengelolaan aktiva tetap sejak dini.
2. Perlu dilakukan penguatan fungsi pemantauan melalui inventarisasi rutin dan rekonsiliasi data antara kondisi fisik dan administrasi aset.
3. Peningkatan kompetensi SDM yang menangani pengelolaan aset dengan pelatihan serta pembinaan teknis terkait pengelolaan Barang Milik Negara dan penerapan SPIP.
4. Optimalisasi sistem informasi pengelolaan aset supaya pencatatan serta laporan bisa dilaksanakan secara lebih akurat, tepat waktu, dan terintegrasi.

Saran tersebut berharap bisa dijadikan pertimbangan dalam upaya meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dan kepatuhan pengelolaan aktiva tetap secara berkelanjutan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- A, M. N., & Permana, I. (2024). Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Kabupaten. *COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian*

- Masyarakat*, 4(8), 2410–2419. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i8.2749>
- Commission, C. of S. O. of the T. (2013). *Internal control—Integrated framework*. COSO. <https://www.coso.org/>
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. *Permendagri*, 1–23. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/300030/permendagri-no-7-tahun-2024>
- Mulyadi. (2016). *Sistem akuntansi* (4th ed.). Salemba Empat. <https://share.google/sIz9GoD46amJkKgtn>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. 2. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang. *Menteri Keuangan, 040501*, 1–66. [file:///C:/Users/Acer/Downloads/PP Nomor 28 Tahun 2020.pdf](file:///C:/Users/Acer/Downloads/PP%20Nomor%2028%20Tahun%202020.pdf)
- Soraya Annisa, Sam Iskandar, E. M. (2023). Analisis Pengendalian Intern Aset Tetap Pada Dinas Sosial Kota Jambi. *JAR-Jambi Accounting Review*, 4(2), 158–167. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jar.v4i2.13367>
- Tyler, T. R. & Melossi, D. (1990). Why (Which) People Obey (Which) Law? Why People Obey the Law. In *Contemporary Sociology* (Vol. 20, Issue 6, p. 914). <https://www.des.ucdavis.edu/Faculty/Sabatier/Tyler1990.pdf>.